

DISERTASI

**ANALISIS AKUNTABILITAS
KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH
DI KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN**

*ANALYSIS OF THE LOCAL BUDGETING POLICY
ACCOUNTABILITY IN SOUTH TANGERANG CITY,
BANTEN PROVINCE*

Dengan Wibawa Rektor
Disertasi Diajukan Untuk Memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang Dipertahankan Pada Tanggal 08 Januari 2018



Oleh :

**SITI AISYAH
NIM: DIP 02 108**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR
TAHUN 2018**

DISERTASI
ANALISIS AKUNTABILITAS
KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH
DI KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN

*ANALYSIS OF THE LOCAL BUDGETING POLICY
ACCOUNTABILITY IN SOUTH TANGERANG CITY,
BANTEN PROVINCE*

Dengan Wibawa Rektor
Disertasi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang Dipertahankan Pada Tanggal 08 Januari 2018

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor
Pada Tanggal

Komisi Promotor


Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS
Ketua Promotor



Prof. Dr. Ngadisah, MA
Anggota Promotor



Dr. Ika Sartika, MT
Anggota Promotor

Mengetahui:

Rektor,



Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

Direktur Pascasarjana











Dr. Sampara Lukman, MA

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI)
UJIAN NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN (S3)**

NAMA MAHASISWA : SITI AISYAH
 N I M : DIP 02 108
 TGL SIDANG TERBUKA : 08 JANUARI 2018
 PROGRAM STUDI : S3 ILMU PEMERINTAHAN .
 JUDUL DISERTASI : ANALISIS AKUNTABILITAS EBIJAKAN
 ANGGARAN DAERAH DI KOTA
 TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN

TELAH DIREVISI, DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI/PENELAAH, KOMISI PROMOTOR

NO	PENGUJI/PENELAAH	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr.Drs.Ermaya Suradinata,SH,MS,MH	1. 
2.	Prof.Dr. Khasan Effendy,M.Pd	2. 
3.	Prof.Dr.H.M/Aries Djaemari,MA	3. 
4.	Prof.Dr.Murtir Jeddawi,SH,MH	4. 
5.	Prof.Dr.Endang Wirjatmi Tri L, M.Si	5. 
6.	Prof.Dr.J Basuki	6. 
7.	Dr. Sampara Lakman,M.A	7. 
8.	Dr. Kusworo,M.Si	8. 

Jatinangor, 05 September 2017

Mengetahui/Menyetujui
Komisi Promotor,


Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.
Ketua Promotor


Prof. Dr. Ngadisah, MA

Co Promotor 1


Dr. Ika Sartika, MT

Co-Promotor 2

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam Daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam Pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jatinangor, 08 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan



Siti Aisyah
NIM. DIP 02 108

DALIL DISERTASI

1. Penerapan kinerja pemerintahan daerah yang seimbang dengan ditunjang oleh perilaku etis aparatur pemerintahan mempunyai andil yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik.
2. Kepemimpinan pemerintahan yang kuat dan menjunjung tinggi etika pemerintahan mampu meningkatkan harapan dalam pencapaian akuntabilitas pemerintahan yang tinggi.
3. Desain kebijakan anggaran yang proporsional dan rasional serta didukung oleh keterbukaan dan partisipasi masyarakat diyakini mampu mewujudkan kebijakan anggaran daerah yang optimal.
4. Kedekatan dengan masyarakat (*citizen intimacy*) dan pelayanan yang prima (*operational excellence*) merupakan kunci keberhasilan dalam membangun nilai-nilai pelayanan yang baik kepada publik.
5. Inovasi dalam pelayanan publik yang didukung oleh Teknologi Informatika yang handal diyakini mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.
6. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional serta didukung oleh Teknologi Informasi dalam pemerintahan memberikan andil bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Kapasitas tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta mempunyai andil dalam mendorong keberhasilan program *corporate philanthropy*.
8. Keterlibatan masyarakat yang memadai dalam pemerintahan memberikan kontribusi dalam meningkatkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan.
9. Sistem informasi yang memadai dan didukung oleh audit oleh badan independen memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya yang semakin terbatas.
10. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kapasitas pegawai dibutuhkan untuk menunjang kompetensi tugas dan fungsi aparatur pemerintahan.

11. Pengembangan standard profesional dan kemampuan teknis aparatur yang ditingkatkan secara terus menerus memberikan andil yang besar dalam meningkatkan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi aparatur.

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN

Oleh:
Siti Aisyah
NIM: DIP 02.108

Tim Promotor:
Prof. Dr. Sadu Waisitiono, M.S
Prof. Dr. Ngadisah, M.A
Dr. Ika Sartika, M.T

Kajian tentang akuntabilitas merupakan isu yang penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Dalam kerangka negara demokrasi, akuntabilitas berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Analisis akuntabilitas kebijakan anggaran berkaitan dengan kemampuan penyelenggara pemerintahan dalam menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kinerja pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dibiayai dari uang yang bersumber dari rakyat, dilaksanakan dengan adil dan berlandaskan kepada etika. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas kebijakan anggaran daerah di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pertanyaan penelitian mencakup tentang akuntabilitas kinerja kebijakan anggaran daerah, bagaimana pencapaian akuntabilitas yang ditinjau dari aspek dan tipe akuntabilitas, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian dibatasi pada data yang berkaitan dengan alokasi belanja langsung tahun 2011-2016. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan pengumpulan data skunder yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menemukan Model *Local Government Scorecard (LGSC)*, pencapaian akuntabilitas, dan strategi yang diperlukan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Implikasi teoritis dari temuan penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu pemerintahan adalah pentingnya mengembangkan konsep kinerja pemerintahan yang seimbang, penegakan moral dan etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan bertindak dalam pemerintahan, serta keterbukaan dan partisipasi dalam pemerintahan.

Kata Kunci: akuntabilitas, Model *Local Government Scorecard*, kebijakan anggaran daerah, pencapaian akuntabilitas, strategi.

ABSTRACT

*ANALYSIS OF THE LOCAL BUDGETING POLICY ACCOUNTABILITY
IN SOUTH TANGERANG CITY, BANTEN PROVINCE.*

By:

*Siti Aisyah
NIM. DIP.02.108*

Promoter Team:

*Prof.Dr. Sadu Wasistiono, M.S
Prof. Dr.Ngadisah, M.A
Dr. Ika Sartika, M.T*

Study on accountability is an important issue in the development of the government science. In countries that embrace democratic framework., accountability concerns the relationship between the governing and the governed. Analysis of budgetary policy accountability with regard to the ability of the government in the answer and explain to the people how the government's performance is done, which is manifested in the form of government activities that costs of the money that comes from the people, carried out fairly and based on the ethics. The problem formulation in this research is, how was accountability of local budget policy in South Tangerang City, Banten Province. Research questions include performance accountability, accountability achievement in terms of dimensions and types, and strategies that can be developed to improve accountability in South Tangerang City, Banten Province.

This study was a qualitative study. The research data is limited to data related to the expenditure in 2011-2016. Data were collected through interviews to informants in relation to problems of research and collection of secondary data that support this research. This study found the Local Government Scorecard Model (LGSC), the achievement of accountability, and the importance of developing strategies to improve accountability in South Tangerang City, Banten Province. The theoretical implications of the research findings in the development of the science of governance are the importance of developing a balanced of the local government performance concept, upholding moral and ethical governance as a guideline in behaving and acting for apparatus, as well as openness and participation in governance.

Keywords: accountability, Local Government Scorecard Model , budget policy on local government, accountability achievement, strategy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat dan karuniaNya, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini merupakan persyaratan kelulusan bagi mahasiswa yang menempuh Program Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Penulis. Namun berkat dorongan dan dukungan Tim Promotor, dosen, keluarga, dan sahabat akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Sebagai ungkapan rasa syukur Penulis atas selesainya Disertasi ini, izinkan Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Yth. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si, Ketua Tim Promotor, Prof. Dr. Ngadisah, MA dan Dr Ika Sartika, MT, sebagai co-Promotor yang banyak memberikan wawasan baru dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, memberikan motivasi, masukan dan saran perbaikan, serta dorongan moral bagi Penulis, sehingga Disertasi ini dapat kami selesaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Yth. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, M.H, M.S, Rektor IPDN, Dr Sampara Lukman, MA, Direktur Pasca Sarjana IPDN, dan Prof. Dr HM. Aries Djaenuri, MA, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan motivasi dan mengajarkan kegigihan dan kesabaran sehingga Disertasi ini dapat kami selesaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para Oponen Ahli yang terdiri dari : Prof. Dr Khasan Effendy, M.Pd, Prof. Dr. Murtir Jedawwi, SH, MH, Prof. Dr. J. Basuki dan Prof. Dr. Endang Wirjatmi Tri L, M.Si dan Dr Koesworo, M.Si, Saran perbaikan dan masukan-masukan dari Oponen Ahli sangat berguna bagi penyempurnaan Disertasi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan penelitian ini, yakni: Ibu Hj Airin Diani Rahmi, Walikota Tangerang Selatan, Bapak Iwan Rahayu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak Basa, Bapak Wawang, Ibu Chusnul, Bapak Ipung, Ibu Bunga, Bapak Safruddin, para Alumni IPDN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan pihak-pihak

lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga pihak-pihak yang membantu Penulisan Disertasi ini diberikan pahala yang sebesar-besarnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka yang telah memfasilitasi penulis untuk studi lanjut di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Prof, Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D, Rektor Universitas Terbuka, Prof Daryono, SH, PhD, Dekan FHISIP Universitas Terbuka, dan Setyo Kuncoro, S.Sos, MA Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FHISIP-UT. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Anto dan Pak Ayi yang bersedia berbagi hasil penelitian di Tangerang Selatan, serta Mas Agus Riyanto yang bersedia berdiskusi panjang lebar tentang kondisi di Kota Tangerang Selatan. Kepada teman-teman di Jurusan Ilmu Administrasi FHISIP-UT (Titik, Wulan, Meita, Pak Enceng, Pak Agus Joko Purwanto, dkk) ijinkan Penulis menyampaikan terima kasih atas dorongan morilnya.

Disertasi ini Penulis dedikasikan untuk keluarga tercinta, yang telah dengan sabar menyemangati Penulis, mendoakan dan memotivasi agar Disertasi ini dapat kami selesaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hj Nurhayati, suami Masri Hamidi beserta anak-anak: Safirah Zam Astari, Deka Taufiq Riansyah, dan Raka Al Hazmi Riansyah, yang tidak henti-hentinya mendoakan Penulis. Terima kasih juga kepada segenap keluarga yang telah mendoakan bagi kelancaran penulisan Disertasi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan di IPDN: Mb Mani, Susan, Milwan, Bunda Nuraeni, Teh Neneng, Freindy, Pak Syahrir, Audy, Tantri, Eddys, Pak Noor (Alm), Pak Thamrin, Bu Melta, Mona, Ade, Pak Sigit, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini, rekan-rekan di bagian Akademik Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN (mbak Wati, mas Supri, mas Dio), izinkan Penulis menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuannya sehingga Disertasi ini dapat Penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat berbagai kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan

masukan bagi penyempurnaan Disertasi tersebut. Semoga Disertasi ini berguna bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan di masa yang akan datang.

Jakarta, 08 Januari 2018

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Siti Aisyah', with a stylized flourish at the end.

Siti Aisyah

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI)	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
DALIL DISERTASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	28
1.3. Pembatasan Masalah	30
1.4. Perumusan Masalah	31
1.5. Tujuan Penelitian	32
1.6. Manfaat Penelitian	33
BAB II KERANGKA TEORI	35
2.1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	36
2.2. Kajian Pustaka	45
2.2. 1. Alasan yang Mendasari Pentingnya Akuntabilitas	45
2.2. 2. Pengertian Akuntabilitas	67
2.2.2.1. Definisi Akuntabilitas	67
2.2.2.2. Perbedaan <i>Accountability</i> dan <i>Responsibility</i>	69
2.2.2.3. Akuntabilitas dan Reformasi Pemerintahan	71
2.2.3. Aspek-aspek Akuntabilitas	72
2.2.4. Derajat Akuntabilitas	76
2.2.5. Tipe Akuntabilitas	79
2.2.6. Akuntabilitas Ditinjau dari Aspek Kinerja	90
2.2.6.1. Teori Kinerja <i>Balanced Scorecard</i> Kaplan dan	91

Norton

2.2.6.2. Teori Kinerja <i>Balanced Scorecard Government and Nonprofit Agencies.</i>	96
2.2.7. Strategi Peningkatan Pencapaian Akuntabilitas	104
2.2.8. Akuntabilitas dalam Ranah Legal Formal di Indonesia	112
2.2.9. Teori dan Konsep Kebijakan Anggaran	115
2.2.9.1. Pengertian Kebijakan Publik	115
2.2.9.2. Pengertian Kebijakan Anggaran	117
2.2.10. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik	129
2.2.10.1. <i>Line Item Budgeting</i>	130
2.2.10.2. <i>Incremental Budgeting</i>	131
2.2.10.3. <i>Planning Programming Budgeting System (PPBS)</i>	132
2.2.10.4. <i>Zero Based Budgeting (ZBB)</i>	133
2.2.10.5. <i>Performance Budgeting</i>	135
2.2.11. Konsep Anggaran Optimum	137
2.2.12. Rasio Penilaian Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	140
2.2.13. Alur Berpikir Penelitian	142
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	146
3.1. Desain Penelitian	148
3.2. Kerangka Konseptual Penelitian	150
3.3. Data yang Diperlukan	153
3.4. Informan dan Cara Menentukannya	154
3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	158
3.6. Teknik Analisa Data	164
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	168
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN	171
4.1. Organisasi dan Kepegawaian Perangkat Daerah	173
4.2. Kekuatan Politik di Kota Tangerang Selatan	177
4.3. Visi, Misi, Prioritas dan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	180
4.4. Kebijakan Anggaran Daerah di Kota Tangerang Selatan	186
4.4.1. Pendapatan Daerah	189
4.4.2. Belanja Daerah	199
4.4.3. Pembiayaan Daerah	213
BAB V ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH	215
5.1. Analisis Perspektif Pelanggan (<i>Customer Perspective</i>)	216
5.2. Analisis Perspektif Proses Internal (<i>Internal Process Perspective</i>)	241

5.3. Analisis Perspektif Keuangan (<i>Financial Perspective</i>)	275
5.4. Analisis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Karyawan (<i>Employee Learning and Growth Perspective</i>)	305
5.5. Analisis <i>Mapping</i> (Pemetaan) Kinerja pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	325
5.6. Implikasi Teoritis dari Temuan Model <i>Local Governance Scorecard</i> terhadap Pengembangan Teori/Konsep Kebijakan Anggaran Daerah dalam Ilmu Pemerintahan	338
5.7. Unsur-Unsur Pengembangan Kinerja Kebijakan Anggaran Daerah dengan Model LGSC	347
BAB VI ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN	351
6.1. Analisis Akuntabilitas Berdasarkan Aspek-aspek Akuntabilitas	351
6.2. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran berdasarkan Aspek dan Tipe Akuntabilitas	407
6.2.1. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Berdasarkan Aspek Akuntabilitas	407
6.2.2. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Berdasarkan Tipe Akuntabilitas	415
6.3. Implikasi Teoritis dari Temuan Pencapaian Akuntabilitas terhadap Kebijakan Anggaran dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan	434
6.4. Unsur-Unsur yang Perlu Dikembangkan Untuk Mengatasi Rendahnya Capaian Akuntabilitas Politik dan Moral	441
6.5. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah	443
6.5.1. Faktor Pendukung dalam Penerapan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah	444
6.5.2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah	445
6.5.3. Strategi Meningkatkan Akuntabilitas dan Optimalisasi Kebijakan Anggaran Daerah	448
BAB VII PENUTUP	465
7.1. Simpulan	465
7.2. Saran	469
DAFTAR PUSTAKA	471
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1. Rasio Belanja RTH dan Total Belanja Daerah	18
Tabel 1.2. Rasio Belanja Modal Vs Total Belanja di Kota Tangerang Selatan	19
Tabel 1.3. Belanja Pemberdayaan Perempuan VS Total Belanja	20
Tabel 1.4. Rasio Belanja Kegiatan Berbasis UKM VS Total Belanja Daerah	21
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2.2 Perbandingan Istilah Desentralisasi	59
Tabel 2.3. Perbedaan Pengertian Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Tiga UU Pemda	60
Tabel 2.4. <i>Choosing The Tools For Accountability</i>	73
Tabel 2.5 Justifikasi dan Kategori Pencapaian Akuntabilitas	78
Tabel 2.6 Pengelompokan Tipe Akuntabilitas	87
Tabel 2.7. Matriks Pilihan	116
Tabel 2.8. Sistem Penganggaran <i>Line Budgeting</i>	130
Tabel 2.9. Sistem Penganggaran <i>Incremental Budgeting</i>	132
Tabel 2.10. Sistem Penganggaran PPBS	133
Tabel 2.11. Sistem Penganggaran ZBB	134
Tabel 2.12. Sistem Penganggaran <i>Performance Budgeting</i>	135
Tabel 2.13 Perbedaan Konsep Anggaran yang Lama dan Anggaran Optimum	138
Tabel 2.14. Rasio Penilaian atas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah	141
Tabel 3.1. Data Dokumen dan Penyedia Data	154
Tabel 3.2. Rancangan Pedoman Wawancara	162
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian dan Penyusunan Laporan Disertasi	169
Tabel 4.1. Sebaran RT, RW, dan Kelurahan Per Kecamatan	171
Tabel 4.2. Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan	174
Tabel 4.3. Peta Kekuatan Politik di DPRD Kota Tangerang Selatan pada Periode 2009-2014 dan 2014-2019	178
Tabel 4.4. Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2014-2019	179
Tabel 4.5. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011	191
Tabel 4.6. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012	192
Tabel 4.7. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	193
Tabel 4.8. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014	194

Tabel 4.9	Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015	195
Tabel 4.10.	Target Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016	196
Tabel 4.11.	Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2011	202
Tabel 4.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2012	203
Tabel 4.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2013	205
Tabel 4.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2014	207
Tabel 4.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2015	208
Tabel 4.16	Anggaran Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2016	210
Tabel 4.17	Realisasi Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2011-2015	211
Tabel 4.18	Rekapitulasi Realisasi Pembiayaan Daerah di Kota Tangerang Selatan	214
Tabel 5.1.	Indikator Survey Kepuasan Masyarakat	223
Tabel 5.2	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	232
Tabel 5.3	Perangkat Daerah dan Urusan Wajib Pemerintah Kota Tangerang Selatan	259
Tabel 5.4	Perangkat Daerah dan Urusan Pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	262
Tabel 5.5.	Jumlah Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	262
Tabel 5.6	Estimasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Lima Tahun	270
Tabel 5.7	Alokasi Belanja Tidak Terduga 2011-2016	273
Tabel 5.8	Prioritas Arah Kebijakan Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016	279
Tabel 5.9	Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2011-2016	287
Tabel 5.10	Dasar Hukum Sistem Keuangan Daerah di Kota Tangerang Selatan	297
Tabel 5.11	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2011-2015	301
Tabel 5.12	Program Pendidikan Kedinasan	308
Tabel 5.13.	Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis TI pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan	317
Tabel 5.14	Perbedaan Model BSC Kaplan & Norton, Model BSC Niven, dan Model LGSC	341
Tabel 6.1	Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2016	385

Tabel 6.2	Analisis Dimensi Akuntabilitass dalam Kebijakan Anggaran di Kota Tangerang Selatan	404
Tabel 6.3	Justifikasi Pencapaian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	411
Tabel 6.4	Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Berdasarkan Tipe Akuntabilitas	432

DAFTAR GAMBAR

		halaman
Gambar 1.1.	<i>The Democratic Pyramid</i>	3
Gambar 1.2	Rata-Rata Realisasi dan Sisa Belanja Daerah 2011-2015	25
Gambar 2.1	Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kebijakan	43
Gambar 2.2.	Keterkaitan Akuntabilitas dengan Ilmu Pemerintahan	44
Gambar 2.3.	<i>Accountability Logical Thinking Framework</i>	66
Gambar 2.4.	Derajat Akuntabilitas	77
Gambar 2.5.	<i>Balanced Scorecard</i> Kaplan & Norton	92
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran <i>Balanced Scorecard</i> Kaplan dan Norton	95
Gambar 2.7	<i>Balanced Scorecard for Government and Nonprofit Agencies</i>	99
Gambar 2.8.	Dasar Pemikiran <i>Balanced Scorecard</i> Niven	100
Gambar 2.9.	Penerapan Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i> dalam Sektor Pemerintahan di Indonesia	102
Gambar 2.10.	Hambatan Akuntabilitas	110
Gambar 2.11.	Strategi Peningkatan Akuntabilitas	111
Gambar 2.12.	Bangunan Teori dan Konsep Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah	129
Gambar 2.13	<i>Logical Thinking Framework</i> Penelitian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah	143
Gambar 2.14.	Kerangka Pemikiran Penelitian	145
Gambar 3.1.	Kerangka <i>Snowball Sampling</i>	158
Gambar 3.2.	Skema Analisa Data	167
Gambar 4.1.	Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan di Kota Tangerang Selatan	172
Gambar 4.2.	Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan	177
Gambar 4.3.	Sebaran Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Menurut Jenis Kelamin	180
Gambar 4.4.	Alur Penyusunan Kebijakan Anggaran Daerah	188
Gambar 4.5.	Struktur APBD	189
Gambar 4.6.	Struktur Pendapatan Daerah	190
Gambar 4.7	Target dan Realiasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2015	198
Gambar 5.1	Skema Pelayanan Pemerintahan	225
Gambar 5.2	Penerapan <i>Customer Value Propositions</i> pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	238
Gambar 5.3	Penerapan <i>Public Perspective</i> pada Pemerintahan Kota	241

	Tangerang Selatan	
Gambar 5.4.	Mekanisme Pemerintah dalam Memahami Masyarakat	244
Gambar 5.5.	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan	261
Gambar 5.6	Penerapan <i>Internal Process Perspective</i> pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	275
Gambar 5.7	Alur Perencanaan dan Penganggaran Sektor Pemerintahan	279
Gambar 5.8	Penerapan <i>Financial Perspective</i> pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan	304
Gambar 5.9.	Pagu dan Realisasi Program Pendidikan Kedinasan Tahun 2011-2015	308
Gambar 5.10	Capaian Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	310
Gambar 5.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	311
Gambar 5.12	Penerapan <i>Employee Learning and Growth Perspective</i> pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	324
Gambar 5.13	Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Selatan dengan Merujuk Teori <i>BSC For Government and Nonprofit Agencies</i>	330
Gambar 5.14	<i>Mapping</i> Kinerja Kebijakan Anggaran Daerah pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan Rujukan Teori BSC Niven	332
Gambar 5.15	Model <i>Balanced Scorecard</i> pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	338
Gambar 6.1	Rata-Rata Realisasi dan Sisa Belanja Daerah (dalam Persentase)	392
Gambar 6.2.	Keterkaitan <i>input, output</i> dan <i>outcome</i>	393
Gambar 6.3	Derajat Pencapaian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016	412
Gambar 6.4	Penjenjangan dalam Pencapaian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran di Kota Tangerang Selatan	434
Gambar 6.5	<i>Participatory Budgeting Process</i> di Porto Alegre, Brazil	457
Gambar 6.6	Strategi Peningkatan Pencapaian Akuntabilitas Kebijakan Anggaran di Kota Tangerang Selatan	462

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor 423.4/256 b/IPDN/2016, tanggal 16 Maret 2016, Program Pasca Sarjana IPDN.
3. Surat Izin Penelitian Nomor 070/151.3/Kesbangpolinmas/2016, Tanggal 28 Maret 2016, Kesbangpollinmas Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. Transkrip Wawancara
5. Tabel Analisis Pencapaian Aspek-Aspek Akuntabilitas
6. Coding Pencapaian Aspek-Aspek Akuntabilitas
7. Tabel Analisis Pencapaian Akuntabilitas Berdasarkan Tipe Akuntabilitas
8. Daftar Riwayat Hidup